

PEMUNGUTAN PAJAK ASET DIGITAL KRIPTO DI INDONESIA

Winnie Angkasa

Universitas Pelita Harapan

winniea31801@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mencari tahu dan menganalisa mengenai baik atau buruknya dampak dari penerapan pajak kripto di negara Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2022 lalu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana bahan-bahan penelitian hukum didapatkan dari asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, internet, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyatakan bahwa negara Indonesia memberlakukan pajak kripto yang berarti pemerintahan Indonesia mengakui keberadaan kripto namun tidak dapat digunakan sebagai suatu alat pembayaran. Penerapan pajak kripto berkaitan dengan dampak kelangsungan bagi negara Indonesia dan juga para investor kripto.

Kata Kunci: Pajak Kripto, Aset, Pemungutan Pajak

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the good or bad impact of implementing crypto taxes in Indonesia which was set on May 1, 2022. This research uses a type of normative research where legal research materials are obtained from legal principles, legal sources, legal theory, the internet, and laws and regulations. This research states that the Indonesian state imposes a crypto tax, which means that the Indonesian government recognizes the existence of crypto but cannot be used as a means of payment. The implementation of crypto tax is related to the sustainability impact for the Indonesian state as well as crypto investors.

Keywords: Crypto tax, Assets, Tax Collection

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal mulanya, bumi ini belum terisi dengan yang dinamakan negara. Negara terbentuk karena manusia memiliki tujuannya di dalam kelangsungan hidup dan berbagai alasan maupun teori mengenai awal mulanya suatu negara terbentuk. Setelah negara terbentuk, terciptalah hukum yang berisikan berbagai aturan norma beserta sanksi di dalamnya bagi yang melanggar. Salah satu hukum yang dibentuk adalah hukum pajak. Seperti yang kita ketahui, bahwa pajak merupakan suatu aksi pemungutan secara paksa dari rakyat kepada pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk kepentingan bersama. Salah satunya pajak yang diberlakukan adalah pajak kripto. Pajak kripto diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 01 Mei 2022 yang lalu. Sebulan setelah ketentuan tersebut diberlakukan, negara Indonesia mendapatkan keuntungan mencapai Rp. 48 Miliar.

B. Rumusan Masalah

Apakah penerapan pajak kripto merupakan langkah yang baik?

C. Tujuan Penulisan

Bertujuan mencari tahu dan menganalisa mengenai baik atau buruknya dampak dari penerapan pajak kripto di negara Indonesia kemudian memberikan kesimpulan dari akhir analisa dari penulis.

D. Pembahasan

Kripto merupakan aset digital .Pemerintahan Indonesia mengakui investasi kripto ,namun kripto tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran. Yang diambil keuntungan di dalam pajak kripto ialah diambil dari setiap transaksi dilakukan. Pemungutan pajak kripto di satu sisi menguntungkan karena dapat menjadi sumber pendapatan negara ,namun pemungutan pajak kripto akan merugikan investornya karena keuntungan yang didapat oleh para investor akan dipotong. Terlebih lagi, nilai besar dari kripto tersebut dapat berubah-ubah dalam sewaktu-waktu.

Penetapan pajak kripto diperkuat dengan adanya Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menganggap bahwa kripto merupakan suatu barang yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Bursa Berjangka merupakan suatu tempat untuk jual beli komoditas. Kripto dipercayai dapat membantu perekonomian negara Indonesia karena dianggap di dalam investasinya memiliki kemampuan untuk membantu negara Indonesia. Investasi ini di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Terdapat Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) atau exchange terdaftar di Bappebti yang dapat digunakan oleh para investor di dalam memperdagangkan aset digital kriptonya ,hal ini akan membuat pemungutan pajak direndahkan nilai besarnya. Apabila melakukan perdagangan aset kripto tidak melalui exchange terdaftar Bappebti ,tetap dapat dilakukan di dalam perdagangannya tetapi nilai pajaknya akan lebih tinggi daripada melakukan perdagangan aset kripto melalui exchange terdaftar Bappebti.

PENUTUP

Tarif pajak aset kripto dapat diperhitungkan kembali mengingat karena tarif pajak aset kripto merugikan para investornya atau Pajak kripto dapat dicoba untuk dikenai terhadap industri atau perusahaan aset kripto. Karena tarif pajak kripto di negara Indonesia saat ini ditujukan kepada tiap individu atas transaksi ataupun perdagangan aset kripto. Apabila dibandingkan antara negara Indonesia dengan AS atau India, negara Indonesia menetapkan pajak kripto lebih cepat. Penetapan pemungutan pajak kripto merupakan hal yang bagus namun ,melakukan praktek pemungutan pajak aset kripto di Indonesia belum mendapatkan kepuasan untuk para investor. Terlebih lagi tinggi dari persentase tarif pajak tidak akan menjamin bahwa negara tersebut akan mendapatkan hasil yang bagus.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia Hariani. Retrieved from [Pajak Aset Kripto di Indonesia Tidak Optimal - PAJAK.COM](#)

CIMB NIAGA. Retrieved from [Mengenal Aset Kripto dan Fungsinya di Indonesia \(cimbniaga.co.id\)](#)

CNN Indonesia. Retrieved from ['Say No' Transaksi Kripto, 'Say Yes' untuk Pajak Kripto \(cnnindonesia.com\)](#)

Novy Lumanauw. Retrieved from [Hindari Pungutan Pajak Tinggi, Transaksi Kripto Disarankan melalui Exchange Terdaftar – Suryani Suyanto & Associates \(ssas.co.id\)](#)

Pajakku. Retrieved from [Pro Kontra Pengenaan Pajak Uang Kripto \(pajakku.com\)](#) .